

## BERPENGARUHKAN BOC EKS POLITIK TERHADAP PENGUNGKAPAN CSR PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI DAN *BASIC MATERIALS*?

Sean Reynard Wimelson<sup>1</sup>; Luky Patricia Widianingsih<sup>2</sup>

Universitas Ciputra, Surabaya<sup>1,2</sup>

Email : sreynard@student.ciputra.ac.id<sup>1</sup>; luky.patricia@ciputra.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komisaris yang memiliki koneksi politik terhadap luasnya pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan energi dan *basic materials*. Sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga terdapat 22 perusahaan sektor energi dan bahan dasar yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris yang mempunyai koneksi politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan indeks pengungkapan CSR lain seperti GRI untuk mendapatkan perspektif berbeda dan potensi perolehan sampel yang lebih besar.

Kata kunci : Dewan Komisaris; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Koneksi Politik

### ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of commissioners who have political connections on the extent of Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure of energy and basic materials companies. The sample of this study used purposive sampling method, so that there were 22 energy and basic materials sector companies that met the requirements to be used as research samples. The data analysis method in this study uses multiple linear regression. The results showed that the board of commissioners who have political connections have a positive effect on corporate social responsibility disclosure. Future research can use other CSR disclosure indices such as GRI to get a different perspective and potentially obtain a larger sample.*

*Keywords : Board of Commissioner; Corporate Social Responsibility; Political Connection*

### PENDAHULUAN

Citra perusahaan merupakan aspek yang harus diperhatikan oleh pemilik perusahaan. Menurut Soemirat & Ardianto (2007) , citra perusahaan merupakan perasaan, kesan, ataupun gambaran masyarakat terhadap perusahaan, dimana perusahaan berusaha menciptakan suatu kesan kepada masyarakat tersebut. Tanpa adanya citra perusahaan yang baik, maka perusahaan bisa mendapatkan berbagai masalah di dalam dunia marketplace. Karena itu, selain perusahaan berfokus pada penjualan produk atau jasa mereka, perlu juga adanya cara atau strategi dalam membangun citra perusahaan yang baik. Dalam hal itu perusahaan dapat memakai CSR

(*Corporate Social Responsibility*) sebagai strategi mereka dalam meningkatkan citra perusahaan mereka (Munzir et al., 2021).

CSR sendiri merupakan suatu kegiatan perusahaan yang dilakukan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat mulai dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. CSR juga telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012, dan juga Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017. Bahkan dalam pasal 74 UU PT pemerintah menegaskan bahwa pengungkapan CSR wajib dilakukan khususnya kepada perusahaan yang berhubungan erat sumber daya alam. Tidak terkecuali para investor yang berinvestasi dalam perusahaan-perusahaan yang ada, pemerintah juga menegaskan dalam Undang-Undang No.25 tentang Penanaman Modal bahwa para investor turut bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan, serta wajib menghormati kebudayaan setempat.

Pada kenyataannya terdapat beberapa kasus dimana kegiatan perusahaan malah merugikan masyarakat setempat, sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan (Pramudita & Widianingsih 2023; Wardhani et al. 2019). Sebagai contoh, terdapat tujuh dari empat puluh satu perusahaan di Provinsi Jambi sektor tambang batu bara yang diketahui tidak menyetorkan dana CSR kepada Pemerintah Provinsi Jambi. Diketahui pada awalnya, empat puluh satu perusahaan telah sepakat untuk menyetorkan total dana untuk CSR sebesar Rp3,9 miliar. Akan tetapi, pada kenyataannya dana yang masuk hanya sebesar Rp3,4 miliar dan diketahui terdapat tujuh perusahaan yang masih belum memberikan kontribusinya (ANTARA, 2023). Selain itu, data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) juga menyatakan bahwa sepanjang tahun 2020 telah terjadi 45 kasus pertambangan di Indonesia. Dimana dari total 45 kasus tersebut terdiri dari: (1) Pencemaran lingkungan sebanyak 22 kasus; (2) Perampasan lahan sebanyak 13 kasus; (3) Kriminalisasi warga menolak tambang sebanyak 8 kasus; (4) PHK karyawan sebanyak 2 kasus. Dari kasus-kasus yang terjadi tersebut, Indonesia dilaporkan mengalami kerusakan lingkungan sebesar 714.692 Ha. Bahkan selain 45 kasus yang terjadi, di tahun yang sama terdapat 3.092 lubang tambang yang dibiarkan oleh perusahaan yang mengartikan perusahaan-perusahaan tersebut tidak melakukan proses reklamasi/pemulihan dan perbaikan (Wibowo, 2021).

Hal-hal tersebut tentu saja bertentangan dengan tujuan CSR yang menargetkan kepentingan eksternal bukan kepentingan internal. Karena hal inilah, penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa CSR yang mereka sudah rancang berjalan dengan baik. Dengan kata lain, visi misi CSR yang telah dibuat harus berfokus kepada kepentingan masyarakat sekitar. Maka dari itu, perusahaan perlu melakukan pengawasan agar strategi CSR yang telah dibuat oleh perusahaan dapat diimplementasikan dengan baik kepada masyarakat (Istiqomah, 2019) . Peran pengawasan dalam perusahaan sendiri biasanya dilakukan oleh dewan komisaris yang mempunyai tugas untuk mengawasi kinerja dewan direksi. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan Indonesia mengadopsi sistem *two tier board* yang mana suatu perusahaan wajib terdiri dari dewan komisaris (sebagai pengawas) dan dewan direksi (sebagai manajemen). Dewan komisaris sendiri nantinya akan dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu komisaris utama dan komisaris independen dikarenakan adanya peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (NO.33/POJK.04/2014) yang mengatakan perusahaan wajib memiliki dewan independen yang berasal dari luar perusahaan.

Sistem *two tier board* sendiri sudah tidak asing digunakan oleh semua perusahaan yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), khususnya di sektor perusahaan yang mempunyai pasar yang luas seperti sektor energi dan juga sektor *basic materials*. Kedua sektor tersebut disebut mempunyai pasar yang luas dikarenakan baik itu sektor energi maupun sektor basic materials, keduanya mempunyai sumber daya yang banyak. Pernyataan ini didukung oleh data milik Kementerian BPN/Bappenas yang menyatakan bahwa Indonesia sendiri memiliki proporsi fosil mencapai 90% dengan bauran energi primer (Low Carbon Development Indonesia, 2019) . Dari hasil data tersebut menunjukkan bahwa sektor energi dan sektor basic materials berkaitan erat dengan penggunaan sumber daya alam, sehingga pengungkapan CSR tidak boleh terabaikan. Kemudian (Khasanah et al. 2023; Risna et al. 2021) menambahkan bahwa agar pengungkapan CSR tidak terabaikan, penting bagi perusahaan untuk memiliki proporsi dan juga keberagaman latar belakang dari dewan komisaris.

Berbagai latar belakang dalam dewan komisaris dapat ditemukan dalam perusahaan sektor energi maupun sektor basic materials. Akan tetapi, terdapat fenomena yang menyatakan bahwa dunia politik memiliki hubungan yang erat dengan perusahaan

yang bergantung pada sumber daya alam. Menurut Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), terdapat beberapa perusahaan khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam ditemukan mempunyai dewan komisaris yang mempunyai latar belakang di bidang kementerian, TNI, dan juga Polri. Dalam bidang kementerian, terdapat mantan menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai komisaris PT Toba Bara Sejahtera dan mantan menteri Agama yang merangkap sebagai komisaris PT Antam dan PT Toba Sejahtera. Beberapa mantan jenderal TNI juga ditemukan menjabat sebagai dewan komisaris di PT Bukit Asam Tbk, PT Kutai Energy, PT Antam, PT Adaro Energy, PT Bintang Prima Energi Pratama, dan PT Adimitra Baratama Nusantara. Kemudian, nama-nama dari unsur Polri juga turut menduduki posisi dewan komisaris di PT Bintang Prima Energi Pratama dan PT Bukit Baiduri Energi (CNN Indonesia, 2021). Selain itu, menteri BUMN Erick Thohir diketahui telah mengangkat Bambang Suswanto yang mempunyai latar belakang sebagai jenderal TNI dan aktif sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM untuk turut menjadi komisaris PT Pertamina (CNN Indonesia, 2023).

Berdasarkan data-data tersebut, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang turut meneliti hubungan antara komisaris yang mempunyai koneksi politik terhadap pengungkapan CSR perusahaan mereka. Menurut Muliwati & Hariyati (2021) koneksi politik berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang lebih baik, begitu juga dengan Nasih et al. (2019) yang mengatakan bahwa dewan komisaris yang mempunyai latar belakang koneksi militer akan mengungkapkan CSR mereka lebih baik daripada dewan komisaris yang tidak mempunyai koneksi militer. Akan tetapi, penelitian Utpala & Adiwibowo (2021) menyatakan sebaliknya dimana koneksi militer sama sekali tidak mempengaruhi pengungkapan CSR suatu perusahaan. Aviyanti et al. (2022) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa komisaris yang memiliki koneksi politik tidak berpengaruh dan cenderung menurunkan angka pengungkapan CSR suatu perusahaan. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian yang membahas hubungan dewan komisaris eks politik dengan pengungkapan CSR, membuktikan perlu dilakukan kajian ulang terkait dengan topik yang bersangkutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab *research gap* dengan cara mencari tahu hubungan antara komisaris utama maupun komisaris independen yang mempunyai latar belakang politik terhadap pengungkapan CSR perusahaan yang bergerak di sektor

energi dan basic materials. Adapun manfaat penelitian adalah untuk memperjelas hubungan dari adanya dewan komisaris utama dan komisaris independen berlatar belakang politik dengan pengungkapan CSR perusahaan sektor energi dan basic materials yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022. Lalu, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi terkait pengungkapan CSR, serta menjadi pengingat untuk perusahaan atas pentingnya pengungkapan CSR kepada masyarakat Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Legitimasi

Pengertian dari teori legitimasi menurut Deegan (2002) sendiri merupakan teori yang menjelaskan bahwa perusahaan akan terus berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan operasional mereka tetap mengikuti norma/aturan dalam lingkungan masyarakat dan juga tidak melewati batas yang sudah ditetapkan oleh masyarakat sekitar. Maka dari itu, perusahaan perlu untuk menyamakan perspektif tujuan perusahaan dengan tujuan masyarakat. Hal ini dikarenakan, jika perusahaan tidak dapat menyamakan tujuan mereka dengan masyarakat, maka kemungkinan perusahaan melanggar batasan yang telah ditetapkan masyarakat akan menjadi semakin besar (Shaheen et al., 2021). Selain itu menurut Wu et al. (2022) penting bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang berdampak positif kepada masyarakat sekitar, sehingga masyarakat akan mengakui bahwa perusahaan tersebut sudah menyelesaikan tanggung jawabnya. Dengan itu maka perusahaan dapat memperkuat legitimasi mereka.

Teori legitimasi juga ditemukan mampu menjelaskan keterkaitan antara koneksi politik dengan pengungkapan CSR. Asas et al. (2022) menyatakan dalam penelitiannya bahwa koneksi politik berperan penting untuk menjadi jembatan komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat terkait dengan pengungkapan informasi CSR, sehingga hal tersebut dapat memperkuat legitimasi perusahaan. Maka dari itu, teori legitimasi disimpulkan dapat menjadi landasan dalam memahami hubungan latar belakang koneksi politik terhadap pengungkapan CSR perusahaan.

### Pengungkapan CSR

Saat perusahaan mengungkapkan kegiatan CSR, maka citra perusahaan tersebut diketahui dapat meningkat (Munzir et al., 2021). Oleh karena itu, agar perusahaan tidak

dipandang buruk oleh masyarakat sebagai entitas bisnis yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan pengungkapan CSR mereka (Azzahra, 2022). Melihat adanya fenomena tersebut, pemerintah Indonesia turut mendukung adanya peningkatan pengungkapan CSR tiap perusahaan. Pada tahun 2017, pemerintah mengeluarkan indeks untuk pengungkapan CSR yaitu Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 atau dapat disingkat sebagai POJK 51. Indeks ini dibuat untuk menjaga perusahaan tetap konsisten dalam mengungkapkan CSR mereka (Vellin et al., 2022). Akan tetapi, meskipun POJK 51 telah diterbitkan oleh OJK sejak tahun 2017, kenyataannya banyak penelitian yang mengukur pengungkapan CSR suatu perusahaan menggunakan indeks GRI (Global Reporting Initiative). Beberapa penelitian yang dilakukan oleh (Pramudita & Widianingsih 2023; Aviyanti et al. 2022; Nasih et al. 2019; Utpala & Adiwibowo 2021) juga mendukung pernyataan tersebut. Maka dari itu, terdapat urgensi yang dirasakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian dari sisi yang berbeda terkait pengungkapan CSR perusahaan dengan menggunakan POJK 51 sebagai alat pengukuran agar peneliti dapat mengetahui seberapa maksimal perusahaan mengungkapkan kegiatan CSR berdasarkan standar milik Indonesia.

### **Board of Commissioner Eks Politik**

Dewan komisaris terdiri dari dua yaitu komisaris utama (pihak internal) dan komisaris independen (pihak eksternal). Komisaris utama sendiri mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya kinerja dari dewan direksi. Dengan dilakukannya pengawasan maka kegiatan perusahaan dapat terkontrol dengan baik dan dapat berjalan sesuai dengan rencana perusahaan. Sedangkan, komisaris independen yang berperan sebagai pihak eksternal mempunyai tugas untuk menjaga keobjektifan pengawasan, mengaudit kegiatan perusahaan sekaligus melaporkan jika ada kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Dengan adanya ukuran dan proporsi dewan komisaris yang baik, maka kegiatan pengawasan dapat menjadi lebih maksimal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novianti & Eriandani (2022) yang mengatakan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris dan adanya proporsi dewan komisaris yang baik dapat meningkatkan pengungkapan CSR suatu perusahaan.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khasanah et al. (2023) dan Risna et al. (2021) selain adanya jumlah dan proporsi dewan komisaris yang baik, terdapat faktor keberagaman latar belakang yang dapat meningkatkan pengungkapan

CSR perusahaan. Menurut Junus et al. (2022) latar belakang dari dewan komisaris khususnya komisaris independen yang sering ditemukan salah satunya adalah latar belakang koneksi politik. Fenomena tersebut dapat terjadi dikarenakan latar belakang politik ditemukan dapat meningkatkan pengungkapan CSR perusahaan (Rahayu & Novarina, 2024). Menurut Muliwati & Hariyati (2021) perusahaan dapat disebut mempunyai koneksi politik jika dewan komisaris memenuhi beberapa kriteria berikut, yaitu: (1) Mantan/anggota partai politik; (2) Mantan/anggota TNI atau Polri; (3) Mantan/anggota dewan; (4) Mantan/anggota jaksa atau hakim; (5) Mantan/anggota instansi pemerintah. Dengan adanya penjelasan terkait kriteria koneksi politik, maka hal tersebut dapat digunakan peneliti dalam menentukan apakah komisaris utama ataupun komisaris independen suatu perusahaan mempunyai latar belakang koneksi politik.

### **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **Pengaruh *Board of Commissioners* Eks Politik terhadap Pengungkapan CSR**

Berdasarkan pengertian dari teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan secara terus menerus berusaha mengikuti norma dan batasan yang telah ditetapkan oleh masyarakat sekitar, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan wajib mengungkapkan CSR mereka. Pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan diketahui dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut (Munzir et al., 2021). Hal serupa juga dikatakan oleh Wu et al. (2022) dimana perusahaan yang mengungkapkan CSR dengan baik dapat memperoleh jaminan keberlangsungan usaha. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan CSR adalah adanya peran dari susunan dewan komisaris terlebih ketika komisaris tersebut memiliki latar belakang koneksi politik (Rahayu & Novarina, 2024).

Selain itu menurut Djunawan & Widianingsih (2023) sewaktu dewan komisaris perusahaan mempunyai koneksi politik, maka reputasi atau citra perusahaan juga dapat meningkat. Maka dari itu, latar belakang koneksi politik mempunyai peran yang besar dalam pengungkapan CSR perusahaan. Hal ini juga dikatakan dalam penelitian Muliwati & Hariyati (2021) dimana koneksi politik ditemukan signifikan dan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan mempunyai koneksi politik jika minimal salah satu dewan komisaris perusahaan baik itu eksternal maupun internal mempunyai latar belakang sebagai

militer/polri, dewan pemerintahan, jaksa/hakim, pemimpin/anggota partai politik, dan juga pejabat/anggota instansi pemerintahan.

Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Nasih et al. (2019) mengatakan bahwa koneksi militer berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Hal ini memperkuat anggapan bahwa koneksi politik mempunyai peran yang kuat dalam pengungkapan CSR. Maka dari itu, sesuai dengan fenomena, teori, dan penelitian terdahulu yang ada maka hipotesis yang dikembangkan peneliti adalah sebagai berikut:

H1 : Latar belakang koneksi politik *Board of Commissioners* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan.

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder berupa *sustainability report* milik perusahaan pada tahun 2020-2022. *Sustainability Report* perusahaan yang digunakan berasal dari laman milik masing-masing perusahaan dan laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dari penelitian adalah perusahaan sektor energi dan *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2023-2024. Populasi dari perusahaan sektor energi dan *basic materials* adalah 192 perusahaan. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: (1) Perusahaan sektor energi dan *basic materials* yang membuat *sustainability report* pada tahun 2020-2022; (2) Perusahaan mengungkapkan CSR nya menggunakan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 mulai dari tahun 2020-2022. Berdasarkan tabel 1, dari total 192 perusahaan dalam sektor energi dan *basic materials*, ditemukan yang memenuhi kriteria terdapat 22 perusahaan yang dapat menjadi sampel penelitian.

### **Variabel dan Pengukuran**

#### **Pengungkapan CSR (Variabel Dependen)**

Pengungkapan CSR umumnya disusun dan dilaporkan pada *sustainability report* milik perusahaan berdasarkan indeks yang telah ditetapkan. Perusahaan nantinya akan



dinilai berdasarkan seberapa banyak *item* yang telah dipenuhi berdasarkan indikator menurut POJK 51 tahun 2017. Dalam POJK 51 sendiri terdapat 50 indikator yang mencakup kinerja ekonomi, sosial, keuangan, dan lingkungan hidup. Rumus untuk mengetahui angka pengungkapan CSR suatu perusahaan adalah sebagai berikut (Bayu & Novita, 2022):

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

Keterangan:

$CSRDI_j$  = Pengungkapan CSR perusahaan J

$\sum X_{ij}$  = Total item yang diungkapkan perusahaan J. Sehingga perusahaan akan diberikan nilai 1 = jika item i diungkapkan, dan nilai 0 = jika item i tidak diungkapkan. Maka,  $0CSRDI_j1$ .

$N_j$  = Total jumlah item pengungkapan CSR sesuai POJK 51,  $N_j50$ .

### Latar Belakang Koneksi Politik (Variabel Independen)

Informasi mengenai dewan komisaris utama ataupun komisaris independen yang mempunyai latar belakang koneksi politik dapat ditemukan dalam *annual report* tahun 2020-2022 milik perusahaan. Dalam *annual report* dapat ditemukan bagian dimana perusahaan menjelaskan profil dari tiap dewan komisaris mereka. Menurut Muliwati & Hariyati (2021) perusahaan dapat disebut mempunyai koneksi politik jika dewan komisaris memenuhi beberapa kriteria berikut, yaitu: (1) Mantan/anggota partai politik; (2) Mantan/anggota TNI atau Polri; (3) Mantan/anggota dewan; (4) Mantan/anggota jaksa atau hakim; (5) Mantan/anggota instansi pemerintah.

Setelah mengetahui kriteria-kriteria tersebut, maka latar belakang koneksi politik selanjutnya dapat diukur memakai metode *variabel dummy* dengan cara: (1) Skor 0 diberikan kepada perusahaan tersebut jika komisaris utama dan komisaris independen sama sekali tidak punya koneksi politik atau minimal satu dewan komisaris mempunyai latar belakang koneksi politik; (2) Skor 1 diberikan kepada perusahaan tersebut jika komisaris utama maupun komisaris independen mempunyai latar belakang koneksi politik.

### Net Profit Margin (Variabel Kontrol)

Menurut Bowman & Haire (1976) dan Purbawangsa et al. (2020) semakin perusahaan mempunyai level profitabilitas yang tinggi, maka perusahaan akan lebih berusaha untuk meningkatkan pengungkapan CSR mereka. Dari hal tersebut, maka NPM yang merupakan salah satu indikator untuk menghitung profitabilitas suatu

perusahaan, ditetapkan menjadi variabel kontrol dengan tujuan menjaga variabel *independen* dan variabel *dependen* tetap konsisten dan mengendalikan hubungan antar variabel *independen* dan *dependen* agar model penelitian lebih baik. NPM dapat dinilai berdasarkan hasil perbandingan antara jumlah laba bersih dengan penjualan yang terdapat dalam *annual report* perusahaan tahun 2020-2022. NPM dapat dirumuskan sebagai berikut (Aruan et al., 2021):

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

### Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis data, antara lain: (1) Statistik deskriptif yang berguna untuk mengetahui karakteristik data penelitian; (2) Asumsi klasik yang mana terdiri dari uji normalitas untuk mengetahui distribusi dari data penelitian, uji multikolinieritas untuk melihat hubungan linear sempurna antara variabel independen dalam model regresi, serta uji heteroskedastisitas untuk melihat ketidaksamaan varian dari *error* pada tiap variabel independen dalam model regresi; (3) Pengujian hipotesis dengan menggunakan metode regresi linear berganda yang terdiri dari koefisien determinasi untuk melihat seberapa banyak variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, uji-F untuk melihat kelayakan model penelitian, serta uji-t untuk melihat apakah variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Metode regresi linear berganda sendiri mempunyai model penelitian sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Model penelitian diatas menjelaskan bahwa variabel Y merupakan variabel *dependen* yaitu pengungkapan CSR suatu perusahaan, variabel X1 merupakan variabel *independen* yaitu latar belakang koneksi politik, dan variabel X2 merupakan variabel kontrol yaitu NPM.

## HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

### Analisis Statistik Deskriptif

Pada penelitian ini terdapat 66 data observasi yang tersedia sebelum dilakukan pengurangan outlier. Kemudian, ditemukan masalah normalitas sehingga dilakukan pengurangan outlier dan ditemukan terdapat 65 data observasi yang diukur dalam model penelitian ini. Dari 65 data observasi yang tersedia, maka dapat dilakukan analisis

statistik deskriptif untuk menganalisis dan memahami data lebih dalam lagi. Dari hasil tabel 2 diketahui untuk skor pengungkapan CSR paling rendah berada di angka 0,5 dan paling tinggi berada di angka 1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang berhasil mengungkapkan CSR dengan lengkap sebanyak 50 butir sesuai dengan ketentuan POJK 51, sedangkan perusahaan ditemukan paling rendah mengungkapkan 25 butir mengacu kepada ketentuan POJK 51. Kemudian, untuk nilai rata-rata pengungkapan CSR adalah 0,867 dimana perusahaan rata-rata mengungkapkan 43-44 butir berdasarkan ketentuan POJK 51. Hasil tersebut menyatakan bahwa rata-rata perusahaan sektor energi dan *basic materials* sudah mengimplementasikan standar POJK 51 dengan baik pada pengungkapan CSR mereka. Hasil rata-rata dari variabel eks politik menyatakan bahwa perusahaan sektor energi dan *basic materials* yang kedua dewan komisarisnya berkoneksi politik cukup banyak yaitu sebesar 44,6%. Kemudian, untuk variabel kontrol NPM diketahui penjualan perusahaan di sektor energi mampu berkontribusi sebesar 17,8% terhadap laba bersih mereka. Angka tersebut telah memenuhi standar NPM sebesar 5%.

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas**

Suatu penelitian dikatakan memiliki model regresi yang baik jika hasil data berada diatas angka 0,05. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan uji Skewness/Kurtosis untuk menguji normalitas dari data yang ada. Berdasarkan hasil dari uji normalitas di tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai Prob>chi2 yang didapatkan sebesar 0,0579. Sehingga, dikarenakan hasil Prob>chi2 lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,05 atau 5%, maka data penelitian ini terbukti terdistribusi secara normal.

#### **Uji Multikolinearitas**

Data dapat dikatakan tidak mempunyai masalah multikolinearitas jika hasil VIF (*Variance Inflation Factor*) dari tiap variabel berada di bawah angka 10. Uji multikolinearitas hanya digunakan saat terdapat beberapa variabel independen, sehingga uji ini tidak dapat digunakan dalam regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil dari tabel 4 yaitu uji multikolinearita, terlihat bahwa masing-masing variabel independen yaitu eks politik dan NPM mempunyai VIF sebesar 1,02. Kemudian, dari kedua data tersebut ditemukan hasil 1/VIF sebesar 0,98, Dari hasil tersebut juga ditemukan rata-rata VIF dari kedua variabel tersebut adalah 1,02. Sehingga, dikarenakan angka VIF

dari kedua variabel berada di bawah angka 10, maka tidak ada gejala masalah multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan metode Breusch-Pagan/Cook-Weisberg yang mempunyai syarat bahwa nilai *P-value* atau *Prob>chi2* harus diatas angka 0,05. Jika hasil dari uji heteroskedastisitas menunjukkan *P-value* atau *Prob>chi2* di bawah angka 0,05 maka terdapat masalah heteroskedastisitas. Sesuai dengan hasil yang disajikan di tabel 5, ditemukan bahwa nilai *P-value* atau *Prob>chi2* dari data penelitian adalah 0,0005. Hasil tersebut tidak memenuhi syarat dimana minimal nilai *P-value* atau *Prob>chi2* adalah 0,05. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa data penelitian ini memiliki masalah heteroskedastisitas, sehingga perlu menggunakan *robust standard error* pada langkah selanjutnya.

### Koefisien Determinasi, uji F, uji t

Untuk bisa mengetahui hasil dari koefisien determinasi, uji-F, dan uji-t maka diperlukan satu langkah terakhir yaitu regresi linear berganda. Kemudian, dikarenakan ada masalah heteroskedastisitas sebelumnya maka dalam regresi linear berganda perlu untuk menggunakan *robust standard error* sehingga hasil dari regresi dapat lebih akurat.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di tabel 6, diketahui nilai koefisien determinasi dari penelitian ini adalah 0,1880 atau 18,8% dimana angka tersebut menjelaskan bahwa variabel eks politik dapat menjelaskan variabel pengungkapan CSR sebesar 0,1880 atau 18,8%, sedangkan angka sisanya yaitu 0,812 atau 81,2% dijelaskan oleh variabel bebas yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Kemudian, syarat agar data penelitian layak untuk diuji adalah nilai F lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Berdasarkan tabel diatas ditemukan hasil uji-F sebesar 0,0002 atau 0,02% dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa data penelitian telah memenuhi kelayakan model sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan analisis selanjutnya.

Uji-t berfungsi untuk melihat apakah signifikansi dari data penelitian dimana *P-value* harus lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Dari tabel diatas diketahui bahwa *P-value* dari variabel eks politik adalah 0,000 atau 0% yang mengartikan bahwa BoC eks politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, sehingga hipotesis pada penelitian ini diterima.

Variabel NPM yang diposisikan sebagai variabel kontrol diketahui mempunyai *P-value* sebesar 0,001 atau 0,1%, sehingga variabel NPM (kontrol) dapat memberikan kontribusi signifikan dalam model penelitian regresi linear berganda ini.

## Diskusi

### **Koneksi Politik *Board of Commissioners* terhadap Pengungkapan CSR Perusahaan**

Dalam perspektif teori legitimasi dijelaskan bahwa perusahaan akan terus berusaha untuk menyamakan perspektif tujuan perusahaan dengan masyarakat, sehingga perusahaan dapat memperoleh citra yang baik dan mempertahankan legitimasinya di masyarakat sekitar. Maka dari itu, teori legitimasi dapat membantu mempertegas posisi penelitian ini dimana saat perusahaan mempunyai koneksi politik, maka hal tersebut dapat menjadi jembatan komunikasi yang kuat antara perusahaan dengan masyarakat yang kemudian berkontribusi pada pengungkapan CSR yang perusahaan lakukan (Asas et al., 2022). Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Muliwati & Hariyati (2021) dan Nasih et al. (2019) yang menyatakan koneksi politik yang dimiliki dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR suatu perusahaan. Semakin komisaris mempunyai koneksi politik, maka pengungkapan CSR perusahaan semakin maksimal. Artinya komisaris berlatar belakang koneksi politik mempunyai hubungan yang kuat terhadap hasil pengungkapan CSR suatu perusahaan.

Hasil statistik deskriptif juga menunjukkan bahwa dari 22 perusahaan periode 2020-2022 yang memenuhi kriteria *purposive sampling*, rata-rata perusahaan sektor energi dan *basic materials* yang kedua dewan komisarisnya terkoneksi politik adalah sebanyak 0,446 atau 44,6%. Karakteristik tersebut bisa jadi turut memberikan kontribusi ke perilaku pengungkapan CSR perusahaan. Hasil tersebut didukung dengan pernyataan Nainggolan et al. (2021) bahwa saat kedua dewan komisaris mempunyai koneksi politik maka mereka akan lebih berfokus pada isu-isu etika perusahaan khususnya pengungkapan CSR. Hal ini dikarenakan, dewan komisaris yang mempunyai koneksi politik akan berusaha untuk membangun reputasi yang baik pada masyarakat melalui pengungkapan CSR salah satunya (Shleifer & Vishny, 1994). Oleh karena itu, saat komisaris utama dan komisaris independen masing-masing mempunyai koneksi politik, maka pengawasan terhadap pengungkapan CSR juga akan lebih ketat dan dapat menghasilkan pengungkapan CSR yang lebih baik.

Dari penelusuran lebih lanjut atas data perusahaan sampel, terdapat temuan menarik dimana 40,9% perusahaan sektor energi dan *basic materials* yang terkoneksi politik di bidang kemiliteran baik itu pada dewan komisaris utama maupun pada komisaris independen. Harymawan et al. (2022) mengungkapkan bahwa seseorang yang mempunyai latar belakang militer cenderung mempunyai sifat disiplin yang tinggi serta kemampuan mengorganisir yang baik, sehingga hal tersebut dianggap dapat berkontribusi pada arah strategi maupun prioritas penting perusahaan, salah satunya terkait dengan luasnya pengungkapan CSR ke arah yang lebih positif. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nasih et al. (2019) dimana *Board of Commissioners* yang mempunyai latar belakang militer mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Dijelaskan bahwa seseorang yang mempunyai latar belakang militer akan mempunyai rasa peduli yang tinggi terhadap sesama dikarenakan mereka terbiasa untuk membela negara termasuk melindungi masyarakat di negara mereka tinggal.

Hal tersebut juga didukung oleh Rahayu & Novarina (2024) dimana saat dewan komisaris mempunyai latar belakang militer, maka mereka akan berusaha untuk memaksimalkan kegiatan CSR yang ditujukan kepada masyarakat sekitar, sehingga pengungkapan CSR juga akan meningkat. Dampak positif dari dewan komisaris berlatar belakang militer tersebut telah disadari oleh banyak perusahaan khususnya sektor energi dan *basic materials* dimana dari 44,6% perusahaan yang terkoneksi politik selama tahun 2020-2022, terdapat 40,9% yang mempunyai latar belakang militer. Oleh karena itu, menunjuk seseorang yang mempunyai latar belakang militer untuk menjadi dewan komisaris, dapat menjadi salah satu strategi perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan CSR.

*Net Profit Margin* (NPM) juga ditemukan mampu menjadi variabel pengendali dalam model penelitian ini. Hal ini dikarenakan, hasil uji-t NPM menunjukkan nilai *P-value* sebesar 0,001 yaitu di bawah nilai signifikansi sebesar 0,05. Artinya, dalam penelitian ini NPM berhasil menjadi pengendali untuk menjaga hasil variabel penelitian dari variabel lain. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. (2022) dimana NPM mampu berkontribusi signifikan terhadap pengungkapan CSR.

## KESIMPULAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris yang mempunyai koneksi politik mempengaruhi pengungkapan CSR perusahaan khususnya di sektor energi dan *basic materials*. NPM yang diposisikan sebagai variabel kontrol juga diketahui berpengaruh signifikan terhadap angka pengungkapan CSR. Hasil tersebut menegaskan bahwa saat dewan komisaris mempunyai koneksi politik, maka pengungkapan CSR perusahaan dapat meningkat dikarenakan adanya kepentingan politik yang dimiliki oleh dewan komisaris tersebut. Temuan ini memberikan implikasi praktis bahwa struktur manajemen perusahaan yaitu BoC perlu mempertimbangkan latar belakang dewannya, khususnya yang memiliki koneksi politik untuk mendorong praktik CSR dan pengungkapan yang lebih baik. Keterbatasan dalam penelitian ini merupakan hanya 22 perusahaan dari 192 perusahaan dalam sektor energi dan *basic materials* yang memenuhi *purposive sampling* terkait dengan penggunaan indeks POJK 51 periode 2020-2022. Setelah itu, dilakukan pengurangan data dikarenakan terdapat outlier sehingga data observasi menjadi 65 dari 66 total data observasi. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah peneliti dapat memperpanjang periode tahun dalam melakukan analisis. Kemudian, peneliti selanjutnya dapat memakai indeks GRI dalam melakukan penilaian pengungkapan CSR, dikarenakan banyak perusahaan yang masih belum mengimplementasikan indeks POJK 51 dalam standar pengungkapan CSR mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA. (2023, March 16). *Tujuh perusahaan tambang batu bara tidak setor CSR*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/3444654/tujuh-perusahaan-tambang-batu-bara-tidak-setor-csr>
- Aruan, D. A., Veronica, V., Liandy, C., Christina, D., & Fanny, F. (2021). Pengaruh Kepemilikan Publik, NPM, Pertumbuhan Perusahaan, dan Solvabilitas terhadap Pengungkapan CSR pada Perusahaan Infrastruktur. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 556–565. <https://doi.org/10.33395/OWNER.V5I2.455>
- Asas, F., Khasanah, U., & Najiyah, F. (2022). Hubungan antara koneksi politik terhadap kinerja lingkungan. *Insight Management Journal*, 2(2), 69–74. <https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.122>
- Aviyanti, R. D., Nik Amah, Andriani, D. N., & Widiastuti, P. (2022). The Effect of Corporate Governance, Political Connection, and Executive Power on Corporate Social Responsibility Performance. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 7(2). <https://doi.org/10.32486/aksi.v7i2.308>
- Azzahra, B. (2022). Integrated Reporting Adoption: Sustainable Corporate Strategy in Achieving SDG 2030. *AJAR*, 5(1), 117–132. <https://doi.org/10.35129/ajar.v5i01.267>

- Bayu, E. K., & Novita, N. (2022). *Analisis Pengungkapan Sustainable Finance dan Green Financing Perbankan di Indonesia*. <https://doi.org/10.35384/jkp.v18i2.332>
- Bowman, E. H., & Haire, M. (1976). Social impact disclosure and corporate annual reports. *Accounting, Organizations and Society*, 1(1), 11–21.
- CNN Indonesia. (2021). *Jatam Ungkap Eks Jenderal TNI-Polri di Perusahaan Tambang*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210124195717-20-597804/jatam-ungkap-eks-jenderal-tni-polri-di-perusahaan-tambang>
- CNN Indonesia. (2023). *Profil Bambang Suswanto, dari Perwira Jadi Komisaris Baru Pertamina*. CNN Indonesia.
- Deegan, C. (2002). The legitimising effect of social and environmental disclosures – a theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311.
- Dewi, R. P., Abbas, S., Hidayat, I., & Rachmania, D. (2022). Pengaruh Hutang, Kepemilikan Saham, Dewan Komisaris dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *JUMBIWIRA : Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v1i3.254>
- Djunawan, A. V., & Widianingsih, L. P. (2023). Pengaruh Ex-politics BOC dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pertambangan Terkoneksi Politik. *Perspektif Akuntansi*, 6(3), 58–74. <https://doi.org/10.24246/persi.v6i3.p58-74>
- Harymawan, I., Putra, F. K. G., Rizki, A., & Nasih, M. (2022). Innovation intensity of military-connected firms. *International Journal of Managerial Finance*, 18(2), 365–397. <https://doi.org/10.1108/IJMF-12-2020-0616>
- Istiqomah, Z. (2019). Mengembangkan Kerjasama di Perpustakaan Melalui Corporate Social Responsibility. *Jurnal Kajian Perpustakaan Dan Informasi BIBLIOTIKA : Jurnal Kajian Perpustakaan Dan Informasi*, 3(1), 32–39. <https://doi.org/10.17977/um008v3i12019p032>
- Junus, O., Nasih, M., Anshori, M., & Harymawan, I. (2022). Politically connected independent board and firm performance. *Cogent Economics and Finance*, 10(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2069638>
- Khasanah, A., Fakhruddin, I., & Pratama, B. C. (2023). Influence of Board Directors, Independent Commissioners, Audit Committee on CSR. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 16(2), 363–372.
- Low Carbon Development Indonesia. (2019). *Sektor Energi – LCDI*. [Lcdi-Indonesia.Id. https://lcdi-indonesia.id/grk-energi/](https://lcdi-indonesia.id/grk-energi/)
- Muliwati, A. R., & Hariyati, H. (2021). Pengaruh Koneksi Politik Dan Media Exposure Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 72–81. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2509>
- Munzir, Rini, T. H. C., & Aziz, M. (2021). Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Citra Perusahaan. *Balance Vocation Accounting Journal*, 5(1), 1–11. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/bvaj/article/view/4792/pdf>
- Nainggolan, Y. A., Astuti, E. D., Rahadi, R. A., & Afgani, K. F. (2021). Political connection and corporate social responsibility: Evidence from indonesia. *International Journal of Business and Society*, 22(2), 922–940. <https://doi.org/10.33736/ijbs.3767.2021>
- Nasih, M., Harymawan, I., Putra, F. K. G., & Qotrunnada, R. (2019). Military experienced board and corporate social responsibility disclosure: an empirical



- evidence from Indonesia. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7(1), 553–573. [https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1\(39\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(39))
- Novianti, N., & Eriandani, R. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *Keuangan Dan Manajemen*, 18(1), 208. <https://doi.org/10.29264/jinv.v18i1.10375>
- Pramudita, N. A., & Widianingsih, L. P. (2023). CSR, GCG, dan Kinerja Keuangan: Bukti Empiris dari Perusahaan Sektor Energi dan Basic Material di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 977–1002. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3863>
- Purbawangsa, I. B. A., Solimun, S., Fernandes, A. A. R., & Mangesti Rahayu, S. (2020). Corporate governance, corporate profitability toward corporate social responsibility disclosure and corporate value (comparative study in Indonesia, China and India stock exchange in 2013-2016). *Social Responsibility Journal*, 16(7), 983–999. <https://doi.org/10.1108/SRJ-08-2017-0160>
- Rahayu, D., & Novarina, D. N. (2024). Peran Political dan Military Connections terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perusahaan Pertambangan di Indonesia. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 48–55. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i1.2421>
- Risna, S. N. W., Bambang, H., Dwi, N. M., & Gusti, R. (2021). The Role of Board of Commissioners and Institutional Ownership in CSR Disclosure: An Empirical Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance*, 8(6). <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.0051>
- Shaheen, R., Yang, H., Bhutto, M. Y., Bala, H., & Khan, F. N. (2021). Assessing the Effect of Board Gender Diversity on CSR Reporting Through Moderating Role of Political Connections in Chinese Listed Firms. *Frontiers in Psychology*, 12, 1–16. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.796470>
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1994). Politicians and Firms. *The Quarterly Journal of Economics*, 109(4), 995–1025.
- Soemirat, S., & Ardianto, E. (2007). *Dasar-Dasar Public Relations*. PT Remaja Rosdakarya.
- Utpala, C. G., & Adiwibowo, A. S. (2021). Pengaruh Manajemen Laba, Kinerja Keuangan dan Military Connection Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Mining yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/33032/26394>
- Vellin, M., Irawan, H., & Setiana, J. (2022). Peran Auditor dalam Memverifikasi Sustainability Report di Perusahaan Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 2477–1783.
- Wardhani, J. V., Widianingsih, L. P., & Karundeng, F. (2019). The Effect Of Company Size, Profitability, Leverage, And Management Ownership Towards The Level Of Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure. *Journal of Accounting, Entrepreneurship, and Financial Technology*, 01(01). <https://doi.org/10.37715/jaef.v1i1.1338>
- Wibowo, E. A. (2021). *JATAM Nasional Catat ada 45 Konflik Tambang Sepanjang 2020*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1426234/jatam-nasional-catat-ada-45-konflik-tambang-sepanjang-2020>

- Wu, Q., Furuoka, F., & Lau, S. C. (2022). Corporate social responsibility and board gender diversity: a meta-analysis. *Management Research Review*, 45(7), 956–983. <https://doi.org/10.1108/MRR-03-2021-0236>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

### TABEL

Tabel 1. Hasil Purposive Sampling

Kriteria	Jumlah
Total Perusahaan sektor energi dan <i>basic materials</i>	192
Perusahaan sektor energi dan <i>basic materials</i> yang tidak membuat SR tahun 2020-2022	(159)
Perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR nya menggunakan POJK 51 mulai dari tahun 2020-2022	(11)
Sampel perusahaan sektor energi dan <i>basic materials</i>	22

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
CSR	65	0.867	0.132	0.5	1
Eks Politik	65	0.446	0.500	0	1
NPM	65	0.178	0.820	-0.43	6.53

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Variable	Obs	Pr (Skewness)	Pr (Kurtosis)	Adj chi2 (2)	Prob>chi2
res	65	0.023	0.348	5.70	0.0579

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
Eks Politik	1.02	0.982
NPM	1.02	0.98
Mean VIF	1.02	

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variables: fitted values of CSR	Prob > chi2
	0.0005

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis

---

Linear Regression		Number of obs =	65
		Prob > F =	0.0002
		R-squared =	0.1880

---

CSR	Coef.	Robust Std. Err.	P> t
Eks Politik	0.111	0.029	0.000
NPM	0.027	0.007	0.001
_cons	0.813	0.025	0.000

---